

# KONSTRUKSI PEMBERITAAN ANGGARAN JANGGAL RANCANGAN APBD DKI JAKARTA 2022 PADA PROGRAM METROTEVNEWS ROOM DAN MATA NAJWA TRANS 7 (ANALISIS FRAMING ROBERT N. ENTMAN)

Volume 5 | Nomor 2  
Oktober 2022

Anastasia Reski Dualembang, Christanto Puji R, Muhammad Zamroni  
Program Studi Televisi dan Film, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember  
Jl. Kalimantan 37, Jember 68121 Email: reskianastasia60@gmail.com

## Abstract

*The present study discusses the reporting construction of two talk show programs, MetroTVNewsRoom and Mata Najwa. The present study aims to find out the reporting construction of MetroTVNewsRoom and Mata Najwa TRANS7 in reporting. Unusual 2020 regional budget plan of DKI Jakarta case. These media possess different backgrounds. Employing descriptive qualitative study, this study spells out in detail the problem of the study. The data were analyzed using Robert N. Entman's framing model analysis. The present study employed the theory of reality construction, ideology, and media ownership. The result of the analysis put evidence that Metro TV, through "MetroTVNewsRoom" in the episode of "Heboh anggaran "aneh" Pemprov DKI and Trans7, through "Mata Najwa" in the episode of "Buka-bukaan Anggaran), are different in constructing the reality and framing the case. As a media whose owner has declared support for Governor Anies Baswedan, MetroTVNewsRoom is affected by its frame; besides, the media owner plays pivotal role in constructing news reality. Meanwhile, Mata Najwa, as a program whose owner does not have a political interest in Governor Anies Baswedan's governance, is sharper in delivering facts and criticism than MetroTVNewsRoom is.*

## Keywords

*Unusual Budget case, Talkshow program, media reality construction, framing, ideology, TV media ownership.*

---

## Pendahuluan

---

Televisi merupakan media audio visual yang penyampaian informasinya menggunakan teknik audio atau suara dan visual atau gambar. Televisi juga merupakan media massa yang cukup mudah diakses dan memiliki banyak fungsi. Fungsi televisi salah satunya, sebagai alat informasi satu arah bagimasyarakat yang membutuhkan informasi baik nasional maupun internasional. Meskipun televisi hanyalah sebuah alat untuk proses penyampaian pesan kepada khalayak, namun televisi memiliki berbagai macam program siaran dalam satu layar yang siap memenuhi kebutuhan penontonnya. Program siaran televisi pada umumnya terdiri dari dua jenis, yaitu program *entertainment* (hiburan) dan program informasi atau berita. Stasiun televisi yang masuk dalam kategori televisi berita antara lain TV One, Metro TV, dan Kompas TV hal ini dibuktikan dari hasil survei litbang Kompas menyatakan satu dari lima responden memilih TVOne, Metro TV dan Kompas TV sebagai televisi berita karena mengaku mendapatkan tayangan berita seputar politik, ekonomi dan olahraga [1]. Stasiun televisi saling bersaing dalam memberikan program terbaik untuk penontonnya tidak terkecuali program *soft news* berformat *talkshow*. Stasiun televisi berlomba-lomba mendapatkan informasi yang viral dan fenomenal di tengah masyarakat, salah satunya kasus mengenai anggaran janggal rancangan APBD DKI Jakarta 2020 yang sempat viral dan menjadi perbincangan hangat di masyarakat sehingga banyak stasiun televisi memberitakan kasus tersebut.

DKI Jakarta sebagai ibu kota negara melakukan perencanaan keuangan daerah secara transparan pada publik yang mulai dilaksanakan sejak lima tahun lalu. Rancangan APBD DKI Jakarta disusun dan dipublikasikan pada publik lewat sistem *e-budgeting*. Sistem ini merupakan salah satu sistem yang digagas pada era pemerintahan Jokowi-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada tahun 2013 dan baru diterapkan pada penyusunan APBD 2014. Aturannya tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 145 Tahun 2013 tentang Penyusunan RAPBD/ APBDP melalui *electronic budgeting*. Peraturan

Gubernur ini ditandatangani oleh Joko Widodo (Jokowi) pada saat menjabat sebagai Gubernur DKI. Kegunaan *e-budgeting* ini membuat semua perencanaan penganggaran diinput secara digital ke dalam sistem yang memungkinkan setiap perubahan angka yang terjadi akan terekam lengkap dengan informasi identitas pengubahnya guna menghindari tindakan manipulasi anggaran Jakarta [2].

Pada Oktober 2017 Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022. Gubernur Anies Baswedan juga menggunakan sistem *E-budgeting* dalam perencanaan penganggaran APBD Jakarta 2020, namun pada tahun keduanya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta ditemukan adanya kejanggalan pada proses rancangan anggaran APBD 2020. William Aditya Sarana, Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mempublikasikan anggaran lem Aibon yang fantastis pada 29 Oktober 2019 di APBD 2020 DKI Jakarta yang ia akses dari halaman *website*, [apbd.jakarta.go.id](http://apbd.jakarta.go.id) [3]. William menyatakan anggaran lem Aibon senilai 82,8 miliar oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta ini menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan menyuplai dua kaleng lem Aibon per murid setiap bulannya. William Sarana melalui akun Instagram pribadinya, @willsarana, mengunggah ulang keanehan anggaran tersebut. William berjanji jika warganet mengunggah ulang *postingan*-nya maka ia akan buka-bukaan soal anggaran DKI Jakarta keesokan harinya [4]. Unggahan William ini sontak menghebohkan masyarakat. Keanehan tidak berhenti pada anggaran lem aibon saja. William kembali mengutarakan bahwa ia menemukan kejanggalan lain dalam rancangan APBD DKI Jakarta, seperti pengadaan bolpoin sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, anggaran Rp 121 miliar juga ditemukan untuk pengadaan 7.313 unit komputer di Dinas Pendidikan, beberapa unit *server* dan *storage* dianggarkan senilai Rp 66 miliar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik [5]. Akibat kehebohan ini, Gubernur Anies Baswedan membentuk tim *ad hoc* untuk menginvestigasi temuan anggaran janggal di Pemprov DKI pada 1 November 2019.

Kisruh anggaran janggal ini menjadi berita populer di berbagai media televisi termasuk Metro TV dan TRANS7. Metro TV sebagai stasiun televisi yang bernaung di bawah Media Group milik Surya Paloh mengemas kasus ini dalam program *MetroTVNewsRoom* dengan format *talkshow live* berdurasi 1 jam yang menghadirkan Gubernur Anies Baswedan sebagai satu-satunya narasumber. Program *MetroTVNewsRoom* adalah program *commentaries news* dan *interview* yang dibawakan oleh empat jurnalis senior MetroTV. Tayang setiap Kamis pukul 20:05 WIB. Penulis memilih *MetroTVNewsRoom* sebagai subyek penelitian karena ingin melihat bagaimana bingkai berita yang ditampilkan Metro TV mengingat pada 24 Juli 2019 terjadi pertemuan antara Surya Paloh dan Anies Baswedan di kantor DPP Nasdem. Pertemuan ini membuahkan dukungan Surya Paloh bagi Anies yang dinilai potensial sebagai pemimpin mendatang. Relasi antara pemilik media dengan para calon kandidat berpotensi mempengaruhi *framing* medianya saat memproduksi berita.

Berbeda dengan *MetroTVNewsRoom*, pemilik TRANS7, Chairul Tanjung justru tidak berkarir dalam dunia politik sehingga konten tayangan televisi yang disajikan tidak berpotensi menyudutkan maupun membela pemerintahan Gubernur Anies Baswedan karena tidak ada kepentingan politik di dalamnya. TRANS7 mengemas kasus anggaran janggal APBD DKI Jakarta 2020 dalam program Mata Najwa episode “*Buka-bukaan anggaran*” dengan format *talkshow live* berdurasi 1 jam 30 menit. Program *Mata Najwa* dipandu oleh *host* Najwa Shihab, yang menghadirkan enam narasumber yang terbagi tiga dari kubu William dan tiga dari kubu pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penulis memilih program *Mata Najwa* sebagai subyek penelitian karena ingin melihat bagaimana TRANS7 membingkai berita yang ditampilkannya.

Media massa dalam hal ini televisi dengan berbagai macam instrumen yang dimilikinya berperan untuk membentuk realitas yang tersaji dalam bentuk pemberitaan. Konstruksi terhadap realitas dapat dipahami sebagai upaya “menceritakan” konseptualisasi sebuah peristiwa, keadaan, dan benda. Isi media adalah hasil para pekerja media mengkonstruksikan

berbagai realitas yang dipilihnya, diantaranya realitas politik [6]. Istilah konstruksi sosial atau *social construction of reality* menjadi terkenal sejak diperkenalkan oleh Peter. L Berger yang memaparkan bahwa proses konstruksi realitas dimulai ketika seorang konstruktor melakukan objektivikasi terhadap suatu kenyataan yakni melakukan persepsi terhadap suatu objek yang dipersepsi. Selanjutnya, hasil dari pemaknaan melalui proses persepsi itu diinternalisasi ke dalam diri seorang konstruktor. Tahap inilah dilakukan konseptualisasi terhadap suatu objek yang dipersepsi. Langkah terakhir adalah melakukan eksternalisasi atas hasil dari proses perenungan secara internal tadi melalui penyertaan-penyertaan, dalam membuat penyertaan tersebut tiada lain adalah kata-kata, konsep atau Bahasa [7].

Ideologi media mempengaruhi media media dalam menyediakan suatu realita, tergantung sudut pandang yang digunakan oleh media tersebut. ideologi dari suatu media tidak lepas dari kepentingan media itu sendiri. Kepentingan media menentukan arah pemberitaan yang ditulis oleh media tersebut, apakah terdapat settingan dalam pemberitaan media tersebut atau tidak. Terkadang informasi yang disediakan oleh para media dikonstruksi, sehingga menjadikan informasi tersebut sebagai alat komunikasi massa dari kepentingan penguasa [8]. Hal ini membuat media tidak lagi bebas malah berada dalam kontrol kepentingan tertentu. Pemilik media tidak segan-segan membuat penyajian konten medianya menyoroti aspek yang dianggap penting dan mendukung kebijakan pemilik media sehingga secara tidak langsung masyarakat telah “dipilihkan” dalam membaca sebuah berita. Pemilik media seakan mempunyai agenda khusus yang ingin disampaikan melalui konten medianya sehingga informasi yang dianggap menyimpang dapat dihalangi.

Adanya perbedaan latar belakang pemilik media membuat penulis tertarik melihat bagaimana program *talkshow MetroTV NewsRoom* dan *Mata Najwa* melakukan konstruksi realitas dan pembingkaiian terhadap berita anggaran janggal rancangan APBD DKI Jakarta 2020, yang dapat diketahui dengan menggunakan analisis *framing* model Robert N.

Entman.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subyek) itu sendiri [9]. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang tidak menggunakan data-data statistik dan jenis penelitiannya adalah deskriptif. Pembahasan penulis nantinya berupa teks dari naskah berita kedua program tersebut yang nantinya menghasilkan data berbentuk deskriptif.

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data dalam penelitian dibagi menjadi dua yaitu, data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan kedua sumber data tersebut. Data primer dalam penelitian ini adalah data video tayangan program *MetroTVNewsRoom* episode “*Heboh anggaran “aneh” Pemprov DKI*” dan program *Mata Najwa* episode “*Buka-bukaan anggaran*”. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti [10]. Data berupa video tayangan, penulis dapatkan dengan cara mengunduh dari situs resmi *metrotvnews* dan dari situs *youtube official Mata Najwa*. Sementara sumber data sekunder pada penelitian ini berupa studi literatur di berbagai sumber tertulis meliputi buku, skripsi atau jurnal dan data yang bersumber dari internet yang mendukung penelitian penulis.

Teknik pengolahan data pada penelitian ini menggunakan reduksi data, sajian data dan verifikasi data. reduksi data dimulai dari mengumpulkan data dokumentasi kemudian dilakukan pemilihan data yang berguna untuk penelitian, selanjutnya data video program penulis sajikan dalam bentuk transkrip naskah. hal ini mempermudah penulis dalam melakukan analisis karena penulis berfokus meneliti konten berita pada program tersebut menggunakan analisis *framing*. Setelah

serangkaian analisis data selanjutnya melakukan penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara menyimpulkan hasil analisis dari sajian data, penulis juga melakukan verifikasi terhadap kesimpulan dengan cara membaca kembali sajian data dengan cermat dan berulang-ulang untuk menemukan adanya kesalahan.

## Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis *framing* model Robert N. Entman, dengan memperhatikan dua dimensi besar yaitu seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas, dilihat menggunakan empat elemen *framing* yaitu : pendefinisian masalah, memperkirakan penyebab masalah, membuat keputusan moral dan rekomendasi penyelesaian. Di dapat hasil bahwa program *MetroTVNewsRoom* episode “*Heboh anggaran “aneh” Pemprov DKI*” dan *Mata Najwa* episode “*Buka-bukaan anggaran*” memiliki konstruksi dan bingkai yang berbeda terhadap beritanya yang ditampilkan. Berikut rincian analisisnya.

### 1. Struktur *framing* pada program *MetroTVNewsRoom* episode “*Anggaran “aneh” Pemprov DKI*” menggunakan model Robert Entman.

<b>Pendefinisian masalah</b> yang diangkat yaitu adanya kesalahan input dan kesalahan ketik pada penyusunan anggaran DKI Jakarta. dan adanya kesalahan anggaran yang berulang.
<b>Penyebab masalah</b> yang diangkat yaitu adanya sistem yang digital namun tidak <i>smart</i> , yang hanya berfungsi untuk orang yang memiliki niat baik. Dan anggaran janggal juga pernah terjadi tahun 2017
<b>Keputusan moral</b> yang ditawarkan yaitu media memberikan informasi bahwa ini hanyalah anggaran sementara yang menjadi <i>dummy</i> pada rapat anggaran. Dan Gubernur Anies secepatnya akan melakukan perbaikan.
<b>Rekomendasi penyelesaian</b> yang ditawarkan yaitu Rara sebagai <i>host</i> menyarankan agar bukan hanya sistem yang harus diperbaiki tetapi juga perilaku dan birokrasinya juga harus di pantau agar tidak timbul perilaku koruptif dan manipulatif. Gubernur Anies Baswedan sepakat dan mengatakan perbaikan birokrasi dan sistem nantinya akan di gabungkan sehingga tercipta sistem yang baik dan pengawasan yang baik pula.

Tabel 1.1 Struktur *framing* pada program *MetroTVNewsRoom* episode “*Anggaran “aneh” Pemprov DKI*” menggunakan model Robert Entman.

Dari analisis empat elemen *framing* di atas menunjukkan Program *MetroTVNewsRoom* pada episode “*Heboh anggaran “aneh” Pemprov DKI*” mengkonstruksi realitas melalui penggambaran seleksi isu dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas yang dibangun oleh media. Seleksi isu merujuk pada pemilihan fakta yang diangkat oleh sebuah media. *MetroTVNewsRoom* memilih fakta dan menulisnya dalam bentuk konten pembahasan dan *list* pertanyaan *host*. fakta yang diangkat mengenai adanya kesalahan *input* dan kesalahan ketik pada penganggaran, Gubernur Anies saat menegur bawahannya dirapat ATK terlihat seperti gaya seorang guru, adanya jawaban berbeda-beda oleh anak buah pak Anies saat ditanyakan mengenai masalah anggaran dan pemilihan judul program yaitu “*Heboh anggaran “aneh” Pemprov DKI*”.

Pemilihan fakta tersebut kemudian dikemas dan ditulis kedalam naskah program dan membuatnya menjadi poin-poin pertanyaan *host* yang kemudian dikonstruksi menggunakan kata dan kalimat yang mengandung informasi yang bermakna, proses ini dinamakan penonjolan aspek tertentu. Seperti *host* mempertanyakan fakta kesalahan *input* dan kesalahan ketik dengan kalimat “Walaupun ada jajaran Pemprov yang mengatakan ini kesalahan input, salah ketik”. Terlihat *host* menggunakan kata jajaran Pemprov yang secara tidak langsung menyalahkan Pemprov dalam hal kasus anggaran janggal. Fakta yang kedua Don Bosco Selamun yang memiliki jabatan sebagai *president director* di stasiun MetroTV yang juga sebagai *host* memberi *pernyataan* mengenai aksi Gubernur Anies Baswedan saat menegur bawahannya dirapat ATK terlihat seperti gaya seorang guru. Disini terlihat cukup jelas kalimat yang digunakan oleh *host* memberi pujian atas tindakan yang dilakukan oleh Gubernur Anies. Fakta yang ketiga adanya jawaban berbeda-beda oleh anak buah pak Anies saat ditanyakan mengenai masalah anggaran. Dan fakta terakhir, judul yang digunakan program *MetroTVNewsRoom* “*Heboh anggaran “aneh” Pemprov DKI*”, dari kedua fakta di atas kalimat yang digunakan terkesan menjadikan anak buah pak Anies dan Pemprov terlihat memiliki kinerja

yang tidak profesional dalam menyusun anggaran. Hal tersebut merupakan salah satu pemilihan fakta yang diambil dan merupakan sebuah konstruksi yang dilakukan oleh Program *MetroTVNewsRoom* dalam membingkai kasus anggaran janggal. Dalam konteks berita, sebuah teks, pertanyaan, pernyataan dari *host* tidak bisa disamakan dengan sebuah salinan dari realitas yang ada, ia harus dipandang sebagai hasil konstruksi atas realitas. Karena itu, sangat potensial terjadi peristiwa yang sama dikonstruksi secara berbeda [11].

## 2. Struktur *Framing* pada Program *Mata Najwa* Episode “*Buka-Bukaan Anggaran*” Menggunakan Model Robert Entman

### Judul segmen 1 : lagi, temuan baru anggaran aneh DKI.

<b>pendefinisian masalah</b> yang diangkat yaitu adanya kejanggalan pada proses penyusunan APBD DKI Jakarta, dan temuan anggaran baru setelah Gubernur Anies menegur bawahannya dirapat ATK.
<b>Penyebab masalah</b> yang diangkat yaitu pemberian revisian anggaran APBD DKI Jakarta kepada anggota DPRD untuk dikritisi diserahkan dua minggu sebelum hari H.
<b>Keputusan moral</b> yang ditawarkan yaitu seharusnya Pemprov menyerahkan data pembelanjaan kepada DPRD untuk dikritisi jauh hari agar DPRD memiliki waktu banyak mengkritisi puluhan ribu komponen anggaran.
<b>Rekomendasi penyelesaian</b> yang ditawarkan yaitu melalui pernyataan Pak Amies Subekti mengatakan mereka akan melakukan perbaikan, mencari solusi mengenai masalah tersebut dan menyisir satu persatu anggaran yang ada.

Tabel 1.2 Lagi, Temuan Baru Angharan Aneh DKI.

### Judul segmen 2 :Uang rakyat kenapa harus dirahasiakan.

<b>pendefinisian masalah</b> yang diangkat yaitu masih ada anggaran aneh yang lolos setelah Gubernur DKI menegur bawahannya terkait anggaran janggal. Dan dokumen yang diunggah William resmi atau palsu.
---

<p><b>Penyebab masalah</b> yang diangkat yaitu dokumen yang diunggah William dianggap tidak resmi oleh pak Suhaimi. Sehingga Najwa mempertanyakan “yang di <i>upload</i> di situs resmi itu bukan dokumen resmi? Baru yang diserahkan ke DPRD yang dianggap resmi?”</p>
<p><b>Keputusan moral</b> yang ditawarkan yaitu terlihat dari pembahasan mengenai dokumen mana yang dianggap resmi, kemudian membuat Najwa mempertanyakan apakah anggaran rakyat merupakan rahasia negara?. Pertanyaan tersebut dilontarkan dengan maksud memperjelas status anggaran rakyat apakah rahasia negara atau tidak.</p>
<p><b>Rekomendasi penyelesaian</b> yang ditawarkan yaitu lewat pernyataan Pak Amies, mengatakan akan menindaklanjuti dan menyisir kembali mengenai anggaran aneh yang baru tersebut.</p>

Tabel 1.3 Uang Rakyat Kenapa Harus Dirahasiakan.

### Judul segmen 3 : Siapa Berhak Pelototi Anggaran Daerah.

<p><b>pendefinisian masalah</b> yang diangkat yaitu tertutupnya proses penganggaran DKI Jakarta kemasyarakat.</p>
<p><b>Penyebab masalah</b> yang diangkat yaitu tidak dilakukan transparansi anggaran APBD pada tahap RKPD dan KUAPPAS dan pernyataan dari pak Taufiq mengatakan masyarakat tidak memiliki hak untuk menyisir anggaran.</p>
<p><b>Keputusan moral</b> yang ditawarkan yaitu seharusnya anggaran rakyat harus bisa diakses oleh masyarakat agar mereka dapat membuktikan apakah yang mereka anggarkan masuk kedalam APBD DKI.</p>
<p><b>Rekomendasi penyelesaian</b> yang ditawarkan yaitu yaitu seharusnya ketika anggaran masih dalam proses rancangan di konsultasikan kepada masyarakat, tetapi mekanisme ini tidak dilakukan oleh dewan DKI dan pemprov DKI.</p>

Tabel 1.4 Siapa Berhak Pelototi Anggaran Daerah.

### Judul segmen 4 : Beda Anies dan Ahok Susun Anggaran.

<p><b>pendefinisian masalah</b> yang diangkat yaitu Adanya perbedaan penyusunan anggaran Gubernur sekarang dengan Gubernur sebelumnya.</p>
--

<p><b>Penyebab masalah</b> yang diangkat yaitu Gubernur sekarang tidak mengunggah dokumen anggaran kesitus resmi APBD DKI Jakarta sehingga transparansi sangat rendah dan masyarakat tidak dapat mengakses anggaran.</p>
<p><b>Keputusan moral</b> yang ditawarkan yaitu pada periode sebelumnya masyarakat bisa mengakses anggaran sementara periode sekarang masyarakat tidak bisa mengakses anggaran rakyat. Terjadikah kemunduran.</p>
<p><b>Rekomendasi penyelesaian</b> yang ditawarkan yaitu lewat pernyataan Musbah mengatakan pada proses rancangan anggaran APBD DKI perlu adanya transparansi agar rakyat dapat mengakses anggaran dan sudah menjadi hak rakyat bisa mengakses APBD DKI.</p>

Tabel 1.5 Beda Anies dan Ahok Susun Anggaran.

### Judul segmen 5 : *E-budgeting* Mudarat atau Manfaat.

<p><b>pendefinisian masalah</b> yang diangkat yaitu kelemahan sistem <i>E-Budgeting</i> yang menjadi warisan pemerintahan sebelumnya.</p>
<p><b>Penyebab masalah</b> yang diangkat yaitu diambil dari pernyataan Ima mengatakan kalau ini bukan kesalahan sistem melainkan karena Gubernur Anis tidak ikut menyisir anggaran dan tidak melakukan transparansi.</p>
<p><b>Keputusan moral</b> yang ditawarkan yaitu harus menyeimbangkan antara perbaikan dan peningkatan sistem serta kebijakan eksekutif atau pengelola anggaran agar anggaran tetap pada tempatnya.</p>
<p><b>Rekomendasi penyelesaian</b> yang ditawarkan yaitu memperbaiki sistem <i>E-budgeting</i>.</p>

Tabel 1.6 *E-budgeting* Mudarat atau Manfaat.

### Judul segmen 6 : Anggaran Besar, Apa Kerja TGUPP?.

<p><b>pendefinisian masalah</b> yang diangkat yaitu membahas kerja TGUPP yang mendapat kritik dari ketua DPRD dalam menangani proses anggaran.</p>
<p><b>Penyebab masalah</b> yang diangkat yaitu setiap tahun APBD untuk TGUPP meningkat namun tidak sebanding dengan kinerjanya dalam mengurus anggaran.</p>

<p><b>Keputusan moral</b> yang ditawarkan yaitu TGUPP harus menyeimbangkan kinerja dengan peningkatan anggaran.</p>
<p><b>Rekomendasi penyelesaian</b> yang ditawarkan yaitu diambil dari pernyataan Pak Taufiq yang memberikan saran kepada TGUPP, DPR dan Gubernur DKI dalam periode 2021 selanjutnya tidak lagi menggunakan sistem <i>dummy</i> dalam proses penganggaran karena dapat menimbulkan persepsi atau multitafsir di tengah-tengah masyarakat.</p>

Tabel 1.7 Anggaran Besar, Apa Kerja TGUPP?.

### Judul segmen 7: Pesan Legislator Mudah untuk Anies Baswedan.

<p><b>pendefinisian masalah</b> yang diangkat yaitu membahas kronologi munculnya anggaran janggal dan tuduhan terhadap William bahwa ia mencari panggung.</p>
<p><b>Penyebab masalah</b> yang diangkat yaitu data yang diunggah oleh William Sarana ke media sosial berstatus data asli atau palsu, karena data tersebut masih di pertanyakan keresmiannya oleh pak Taufiq.</p>
<p><b>Keputusan moral</b> yang ditawarkan yaitu bahwa William Sarana sebagai orang yang pertamakali membuka kasus anggaran janggal kemasyarakat bersedia menerima resikonya.</p>
<p><b>Rekomendasi penyelesaian</b> yang ditawarkan yaitu diambil dari pernyataan Ima yang mengatakan seharusnya pak Anies tidak perlu <i>insecure</i> menghadapi masalah ini, karena memang seharusnya rakyat berhak tau uang masyarakat digunakan untuk apa. Dan dari William mengatakan seharusnya pak Anies tidak takut dengan caranya, mengunggah anggaran ke media sosial yang menimbulkan perdebatan di masyarakat karena Indonesia merupakan negara demokrasi.</p>

Tabel 1.8 Pesan Legislator Mudah untuk Anies Baswedan.

Dari analisis empat elemen *framing* di atas menunjukkan Program *Mata Najwa* lewat episode “*Buka-bukaan anggaran*” juga mengkonstruksi realitas melalui penggambaran seleksi isu dan penonjolan aspek tertentu dari realitas yang dibangun oleh media. Seleksi isu merujuk pada pemilihan fakta sementara penonjolan aspek tertentu merujuk pada penggunaan kata, kalimat, gambar dan citra tertentu untuk ditampilkan oleh media kepada khalayak [11]. Dari hasil analisis empat elemen *framing* di atas terlihat pemilihan fakta yang

digunakan sebagai konten berita dan pertanyaan *host* yang dilontarkan mulai dari segmen 1 sampai segmen 7 mengangkat fakta, yaitu masih terdapat anggaran janggal baru setelah Gubernur Anis menegur bawahannya dirapat ATK, apakah anggaran rahasia negara ya?, ketua DPRD Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta Gubernur DKI untuk membuka dokumen KUAPPAS, Najwa mempertanyakan perkataan dari tim Pemprov yang mengatakan bahwa masyarakat tidak memiliki hak untuk ikut menyoroti dokumen anggaran, Najwa mempertanyakan mengapa Gubernur sekarang atau periode sekarang tidak mengunggah anggaran sementara Gubernur sebelumnya atau periode sebelumnya telah membuka akses anggaran ke masyarakat, dan pada catatan *Mata Najwa* mengangkat fakta bahwa pemerintahan saat ini tidak bisa dipercaya sepenuhnya mengurus uang rakyat sehingga harus adanya pengawasan dan transparansi.

Setelah melewati tahap pemilihan fakta dilapangan, selanjutnya fakta yang ada masuk pada tahap penonjolan aspek tertentu yang dikemas dan ditulis ke dalam naskah program dan dibentuk menjadi poin-poin pertanyaan *host* yang kemudian dikonstruksi menggunakan kata dan kalimat yang mengandung informasi yang bermakna. Dari pemilihan fakta di atas *Mata Najwa* menitikberatkan pembahasan dan pertanyaan kepada Pemprov, terlihat cukup jelas pertanyaan dan *pernyataan* dari Najwa yang menyudutkan Pemprov, seperti fakta yang diangkat, Imah mengatakan masih terdapat anggaran janggal baru setelah Gubernur Anis menegur bawahannya dirapat ATK, Najwa kemudian membenarkan bawah tim *Mata Najwa* juga menemukan data tersebut, yang terkesan memberi panggung kepada Imah kemudian menyudutkan kerja Pemprov dan Gubernur. Penonjolan aspek tertentu terlihat jelas pada pemilihan judul dari tiap segmen yang diangkat, yang terkesan menyudutkan serta memprotes kerja Pemprov dan Gubernur DKI, dan fakta perlunya pengawasan dan transparansi dalam melakukan proses penganggaran. Disisi lain tim William hadir sebagai narasumber yang mempertanyakan anggaran janggal, hal ini terlihat mereka hadir sebagai pahlawan dari rakyat yang mengkritisi kerja Pemprov dan Gubernur dalam hal, tidak

melakukan transparansi anggaran ke masyarakat.

---

### Kesimpulan dan Saran

---

Dari hasil analisis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa stasiun MetroTV lewat program *MetroTVNewsRoom* sebagai media yang pemiliknya telah menyatakan dukungan terhadap Gubernur Anies Baswedan memiliki pengaruh terhadap *framing* berita yang dibuatnya dan pemilik media menjadi kunci pembentukan realitas pemberitaan. Sementara program *Mata Najwa* sebagai media yang pemiliknya tidak memiliki kepentingan politik di pemerintahan Anies Baswedan, lebih tajam melontarkan fakta dan kritikan dalam bingkai beritanya dibandingkan program *MetroTVNewsRoom*.

Limitasi atau keterbatasan dalam penelitian ini adalah penelitian ini hanya sebatas pada konteks bagaimana media melakukan konstruksi realitas. Penelitian ini tidak sampai pada konteks *audience framing*, dalam konteks ini akan diketahui bagaimana bingkai yang ditangkap oleh khalayak atas konstruksi realitas yang dilakukan oleh media massa. Sehingga pada penelitian selanjutnya dapat diteliti bagaimana penerimaan khalayak atas pemberitaan yang ditampilkan oleh stasiun Metro TV lewat program *MetroTVNewsRoom* episode “*Heboh anggaran “aneh” Pemprov DKI*” dan stasiun TRANS7 lewat program *Mata Najwa* episode “*Buka-bukaan anggaran*”. Pada akhirnya nanti akan terlihat apakah kedua stasiun televisi di atas berhasil menyampaikan bingkai yang dikonstruksinya kepada khalayak melalui penerimaan khalayak atas pemberitaan.

---

### Daftar Pustaka

---

- [1] Kumoro, Heru. S. 2016. Survei Litbang Kompas: Televisi, Dua Sisi Mata Uang, <https://nasional.kompas.com/read/2016/03/30/05374961/Survei.Litbang.Kompas.Televisi.Dua.Sisi.Mata.Uang>, (14 Maret 2020).
- [2] Carina, Jessi. 2019. Beda Transparansi Anggaran Era Ahok dan Anies: Awalnya Bebas Diakses, Kini Harus Tunggu Sah Dulu, <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/10/31/06464571/beda-transparansi-anggaran-era-ahok-dan-anies-awalnya-bebas-diakses-kini?page=all>, (11 Januari 2020).
- [3] Fitriandum, Febia. R. 2019. PSI Dituduh Anies Cari Panggung

setelah Bongkar Anggaran LemAibon, William Bantah: Sudah Tugas Kami, <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/11/04/psi-dituduh-anies-cari-panggung-setelah-bongkar-anggaran-lem-aibon-william-bantah-sudah-tugas-kami>, (11 Januari 2020)

- [4] Santoso, Bangun. 2019. Heboh Anggaran Disdik DKI, Pembelian Lem Aibon Rp 82 Miliar, <https://www.suara.com/news/2019/10/30/062407/heboh-anggaran-disdik-dki-pembelian-lem-aibon-rp-82-miliar>, (11 Januari 2020).
- [5] Juliati, Sri. 2019. Siapa William Aditya Sarana? Anggota DPRD DKI Termuda yang Bongkar Anggaran Aibon Rp 82M, <https://www.tribunnews.com/metropolitan/2019/10/31/siapa-william-aditya-sarana-anggota-dprd-dki-termuda-yang-bongkar-anggaran-aibon-rp-82-m>, (11 Januari 2020).
- [6] Sobur, A. 2002. *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- [7] Hamad, Ibnu. 2004. *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*. Jakarta: Granit.
- [8] Yusuf, Akhmad. 2016. Ideology media massa, <http://antologicoretanku.blogspot.com/2016/02/ideologi-media-massa.html>, [8 februari 2020].
- [9] Furchan, A. 1992. *Pengantar Metoda Penelitian Kualitatif*. Surabaya : Usaha Nasional Surabaya Indonesia.
- [10] Afifuddin dan Saebani. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- [11] Eriyanto. 2002. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKis.